

Strategi Integrasi Sosial dan Ekonomi Imigran Ilegal Rohingya di Wilayah Perbatasan Indonesia – Myanmar

Nurman Machmud¹ Hikmat Zakky Al-Mubaroq² Editha Praditya Duarte³
Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}
Email: get.nurman@gmail.com¹

Abstrak

Permasalahan mendasar adalah banyak ribuan imigran ilegal yang memasuki wilayah Indonesia melalui jalur perbatasan Myanmar pada setiap tahunnya. Kedatangan mereka tentu sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan persaingan ekonomi dengan masyarakat lokal di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah Aceh Utara. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sosial dan ekonomi yang tepat bagi imigran Rohingnya menjadi sangat penting. Integrasi sosial dan ekonomi adalah sebuah proses penyatuan dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda, baik dari segi budaya, agama, etnis, maupun status sosial ekonominya. Integrasi sosial dan ekonomi yang kuat dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera dan produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Analisis data yang digunakan itu deskriptif dengan studi literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun data yang digunakan itu data primer dan data sekunder dengan bersumber pada google scholar, publish or perish, dan website resmi mengenai kebijakan dalam menangani imigran rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis situasi dan permasalahan dalam integrasi imigran Rohingnya saat ini di wilayah perbatasan, hal ini tentunya mengganggu sosial dan adanya persaingan ekonomi. Tentunya pemerintah harus merumuskan strategi integrasi sosial dan ekonomi yang efektif dan efisien di wilayah perbatasan Indonesia dan Myanmar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi integrasi sosial dan ekonomi imigran Rohingnya yang efektif itu mencakup: mediasi konflik, sosialisasi multikulturalisme, akses langsung ke layanan publik, memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, serta memberikan program yang padat karya infrastruktur daerah. Penelitian ini menunjukkan tantangan-tantangan seperti kompleksitas hukum, resistensi sosial dan perlunya kebijakan pemerintah. Pentingnya strategi komprehensif yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan hukum. Tentunya dalam implementasi strategi ini memerlukan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait seperti pejabat daerah dengan pejabat pusat.

Kata Kunci: Imigran Ilegal, Integrasi, Rohingnya, Strategi, Wilayah Perbatasan

Abstract

The fundamental problem is that thousands of illegal immigrants enter Indonesia through the Myanmar border every year. Their arrival certainly has the potential to cause social conflict and economic competition with local communities in the border area, especially in North Aceh. Therefore, proper social and economic integration for Rohingya immigrants is crucial. Social and economic integration is a process of unification of different groups of people, both in terms of culture, religion, ethnicity, and socio-economic status. Strong social and economic integration can create a harmonious, prosperous and productive society. This research uses a qualitative method, the data analysis used is descriptive with a literature study that is relevant to the topic of discussion. The data used are primary data and secondary data sourced from google scholar, publish or perish, and official websites regarding policies in dealing with rohingya immigrants entering Indonesian territory. the purpose of this study is to analyze the situation and problems in the current integration of Rohingya immigrants in the border region, this certainly disrupts social and economic competition. Surely the government must formulate an effective and efficient social and economic integration strategy in the border region of Indonesia and Myanmar. The results of this study show that effective social and economic integration strategies of Rohingya immigrants include: conflict mediation, socialization of multiculturalism, direct access to public services, providing business capital assistance and skills training, and providing labor-intensive regional infrastructure programs. The research points to challenges such as legal complexity, social resistance and the need for government policies. The importance of a comprehensive strategy that takes into account social, economic and legal

aspects. Of course, the implementation of this strategy requires coordination between relevant stakeholders such as local officials and central officials.

Keywords: *Illegal Immigrants, Integration, Rohingya, Strategy, Border Region*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Permasalahan mendasar adalah banyak ribuan imigran ilegal yang memasuki wilayah Indonesia melalui jalur perbatasan Myanmar pada setiap tahunnya. Kedatangan mereka tentu sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan persaingan ekonomi dengan masyarakat lokal di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah Aceh Utara. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sosial dan ekonomi yang tepat bagi imigran Rohingnya menjadi sangat penting. Isu kedatangan imigran ilegal Rohingnya ke Indonesia melalui perbatasan Myanmar beberapa tahun terakhir itu semakin banyak dari tahun sebelumnya. (AMANDA JUFRIAN, 2023)



Sumber: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Farhanditya, 2023)

UNHCR melaporkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, banyak orang Rohingnya masuk ke Indonesia: 2.089 ribu di tahun 2021, 2.286 ribu di tahun 2022, dan 1.734 ribu di tahun 2023. Jumlah total mereka 6.109 ribu jiwa, hal ini diperkirakan akan terus bertambah dari tahun 2021 hingga 2023. (Farhanditya, 2023) . Hal ini terjadi karena keadaan darurat ini telah menyebabkan peningkatan pengungsi, yang disebabkan oleh konflik, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam, atau peristiwa cuaca ekstrem. Banyak orang dan keluarga sangat membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan. (Andrew McConnell, 2024) Imigran ilegal Rohingnya pada umumnya melarikan diri dari konflik internal yang terjadi di negara tempatnya Myanmar, sehingga terjadi diskriminasi di Myanmar. Akhirnya mereka mencari tempat perlindungan sementara di negara-negara wilayah ASEAN seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. (Christyanti, 2022). Tentunya hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi Indonesia dari gelombang besar imigran ilegal Rohingnya yaitu munculnya potensi konflik garis horizontal dan persaingan ekonomi dengan masyarakat lokal di wilayah perbatasan Indonesia dan Myanmar.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah mengidentifikasi adanya peningkatan dalam insiden kekerasan antar kelompok dan sentimen yang anti imigran di tengah masyarakat. (Siddiqui M.A & Akhter C, 2020). Selain itu, kehadiran imigran Rohingnya yang signifikan juga memicu persaingan di pasar tenaga kerja yang tidak formal sehingga menekan tingkat upah pekerja lokal. (Nanda Fahriza Batubara, 2023). Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah perbatasan yang ada. Dari akses pendidikan kesehatan, sanitasi dan perumahan kerap memicu ketegangan yang horizontal. Seharusnya

keberadaan imigran ilegal Rohingya di wilayah perbatasan Indonesia dan Myanmar tidak boleh mengganggu stabilitas negara yang menampungnya. Hal itu merupakan kondisi ideal bagi imigran yang berada di negara Indonesia. Adanya imigran Rohingya ini tidak boleh mengganggu keadaan dinamika sosial, politik dan ekonomi masyarakat lokal. Mereka seharusnya dapat terintegrasi secara mandiri dalam sistem sosial yang ada di masyarakat tanpa harus menimbulkan friksi. Demikian pula secara ekonomi, Imigran Rohingya semesti mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bersaing secara destruktif dengan pekerja setempat. (Nanda Fahriza Batubara, 2023). Namun kondisi ideal tersebut, saat ini masih sangat jauh dari harapan mengingat dalam persoalan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan ini, akibat adanya keberadaan imigran Rohingya yang sering mencuat di perbatasan.

Menurut (Kamanto Sunarto, 1993), Integrasi merupakan suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan ras tersebut. Sedangkan, Integrasi sosial dan ekonomi adalah sebuah proses penyatuan dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda, baik dari segi budaya, agama, etnis, maupun status sosial ekonominya. Integrasi sosial dan ekonomi yang kuat dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera dan produktif. Penelitian ini menggunakan teori integrasi sosial AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency) milik . (Talcott Parsons, 1951) untuk membuat strategi untuk integrasi sosial dan ekonomi. Adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan laten adalah empat fungsi sistem integrasi sosial yang diperlukan, menurut teori. Teori ini dapat bermanfaat dalam konteks aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi karena dapat membantu memahami bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekonomi, mencapai tujuan ekonomi bersama, mempertahankan integrasi sosial, dan mempertahankan norma dan nilai yang mendukung aktivitas ekonomi.

Hal ini akan dihadapi Indonesia dalam hal masalah integritas sosial dan ekonomi, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan itu terjadi menurut. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024). Seperti karakter alamiah Indonesia sebagai negara plural akan selalu melahirkan masalah state dan nation buildings, adanya faktor kemiskinan dan kompleksitas hubungan antara masyarakat dan negara. Hal ini terjadi di beberapa kasus belakangan seperti penolakan masyarakat lokal terhadap imigran Rohingya di wilayah perbatasan Indonesia dan Myanmar tidak luput dari masalah sosial dan konflik/ kekerasan. Tidak cukup penelitian tentang metode integrasi sosial dan ekonomi yang efektif untuk imigran ilegal Rohingya dan tidak sesuai dengan konteks lokal wilayah perbatasan Indonesia-Myanmar. Sejauh ini, kebijakan yang ada lebih inkremental dan episodik daripada menyeluruh. Namun, menurut teori integrasi imigran, untuk mencapai integrasi yang berkelanjutan bagi pendatang dan kelompok minoritas, diperlukan kombinasi strategi dari bottom-up inisiatif dan top-down policy. (Heckmann F & Bosswick D, 2006). Oleh karena itu penelitian ini mengeksplorasi strategi integrasi sosial dan ekonomi bagi imigran Rohingya di wilayah batasan, hal ini menjadi sangat penting untuk mengisi research gap tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah strategi integrasi sosial dan ekonomi bagi imigran ilegal Rohingya yang efektif sehingga dapat diterapkan di wilayah perbatasan Indonesia dan Myanmar. Penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek penting sebagai berikut: 1) Membuat pemetaan antara isu dan faktor dalam pemicu konflik sosial antara imigran Rohingya dan masyarakat lokal. 2) menganalisis sebuah persaingan ekonomi antara kelompok masyarakat lokal dengan keberadaan imigran ilegal Rohingya. 3) merumuskan rekomendasi sebuah kebijakan integrasi sosial dan ekonomi yang komprehensif dan dapat diterapkan di wilayah perbatasan Indonesia – Myanmar. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penanganan isu imigran Ilegal Rohingya di Indonesia kedepannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif menjelaskan tentang perkembangan fenomena sosial sehingga ada kecenderungan sosial untuk berperilaku sebagaimana mestinya terjadi. Dengan pendekatan studi pustaka dengan menggunakan pencarian literatur di publish or perish, google scholar, selain itu situs website resmi yang terkait dan relevan dengan penelitian ini. (Sugiyono, 2013). Tujuan untuk memahami situasi saat ini sehingga dapat merumuskan integrasi sosial dan ekonomi imigran ilegal Rohingya di wilayah perbatasan Indonesia dan Myanmar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan triangulasi data. dengan peneliti sebagai instrumen penting yang berperan dalam penelitian ini, dibantu dengan alat-alat penelitian. (J. Moleong Lexy, 2002)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedatangan imigran ilegal Rohingya dalam jumlah besar yang mendarat di wilayah perbatasan Indonesia dan Myanmar kerap memicu adanya konflik sosial dengan masyarakat lokal. (AMANDA JUFRIAN, 2023). Hal ini bukan masalah baru, melainkan memang sudah terjadi sejak tahun 2015. Kedatangan imigran ilegal Rohingya di Indonesia itu karena mereka mencari suaka perlindungan di wilayah negara-negara ASEAN seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, atas tindakan kebijakan pemerintah di Myanmar yang mengakibatkan mereka tidak memiliki hak kewarganegaraan di negara tersebut. Imigran ilegal Rohingya yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Myanmar seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam integrasi sosial dan ekonomi. Mereka sering menghadapi diskriminasi sosial, kesulitan dalam mengakses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memiliki kesempatan kerja yang terbatas. Selain itu, konflik politik dan ketegangan antar etnis juga memperkuat proses integrasi mereka ke dalam masyarakat. (Ahmad Rahman, 2019)

Isu Dan Pemicu Konflik Sosial Antar Kelompok

Ada beberapa penelitian yang menunjukkan tiga pemicu utama konflik, yaitu persaingan dan ketidakpuasan terhadap distribusi sumber daya publik yang tidak dapat dinikmati oleh banyak orang. (Alchatib, 2021). Kedua, perbedaan budaya dan agama. Kita tahu bahwa wilayah perbatasan Indonesia atau wilayah Pidie mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganut tradisi agama Islam. Namun, imigran ilegal Rohingya tidak hanya beragama Islam, tetapi juga beragama Kristen, Hindu, dan Budha. Ketiga, prasangka dan stereotip antar kelompok adalah konsep yang terkait dengan perasaan negatif dan generalisasi yang salah tentang orang lain. Karena mereka adalah bagian dari kelompok sosial. Prejudice dan stereotip antar kelompok adalah konsep yang berkaitan dengan perasaan negatif dan generalisasi yang salah tentang orang lain karena mereka adalah bagian dari suatu kelompok sosial. Terdapat beberapa penelitian yang mengidentifikasi tiga hal utama pemicu konflik, yaitu persaingan dan ketidakpuasan terhadap perpecahan orang. penonton, sehingga tidak banyak orang yang bisa menikmatinya. Kedua, perbedaan budaya dan agama. Kita tahu bahwa wilayah perbatasan Indonesia atau wilayah Pidi mayoritas beragama Islam dan menganut tradisi agama Islam. Namun, imigran gelap Rohingya tidak hanya beragama Islam, tetapi juga beragama Kristen, Hindu, dan Budha. (Amanda Jufrian, 2023). Ketiga, prejudice dan stereotip antar kelompok adalah konsep yang terkait dengan perasaan negatif dan generalisasi yang salah tentang orang lain. Karena mereka adalah bagian dari kelompok sosial. Prejudice dan stereotip antar kelompok adalah konsep yang berkaitan dengan perasaan negatif dan generalisasi yang salah tentang orang lain karena mereka adalah bagian dari suatu kelompok sosial. (Ikuteyijo U. D, 2021) Sedangkan di penelitian (Delina L., 2018), memetakan setidaknya ada lima faktor yang memicu konflik sosial antar imigran Rohingya dengan masyarakat lokal di wilayah perbatasan. Yaitu pertama, adanya persaingan lapangan pekerjaan informal sehingga menekan upah

masyarakat lokal. Kedua, potensi mengganggu kondisi stabilitas ekonomi di wilayah perbatasan. Ketiga, adanya sentimen dalam hal agama dan budaya yang berbeda antara masyarakat lokal dengan imigran ilegal Rohingya. Keempat, persepsi yang tidak adil atas penyaluran bantuan sosial kepada imigran Ilegal Rohingya dengan layanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat lokal yang berada di wilayah perbatasan. Dan kelima, adanya provokasi yang dilakukan oleh pihak tertentu atas dasar kepentingan politik. Kelima faktor ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam memacu eskalasi konflik sosial yang terjadi di antar kelompok di tengah kompetensi sumber daya yang terbatas.

Persaingan Ekonomi dan Dampaknya

Kedatangan imigran ilegal Rohingya dalam jumlah massa yang besar, hal ini berpotensi dalam memicu persaingan ekonomi dengan masyarakat lokal di sektor lapangan pekerjaan informal yang terdapat di wilayah perbatasan Indonesia-Myanmar. Kondisi ini telah menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal di wilayah perbatasan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Alchatib, 2021), membahas mengenai bahwa adanya kehadiran imigran ilegal Rohingya ini, ikut meningkatkan pasokan tenaga kerja untuk wilayah setempat di sektor perkebunan, pembangunan atau konstruksi, dan rumah tangga yang menyerap mayoritas pekerja informal lokal. Akibatnya, tingkat upah harian buruh di sektor-sektor tersebut mengalami penurunan hingga 20-30% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan masyarakat lokal mengalami kesulitan dalam bersaing, bahkan ada beberapa dari mereka diantaranya kehilangan pekerjaan mereka. Menurut (IOM, 2018), 32% dari seluruh pekerja di Aceh mengalami penurunan pendapatan akibat persaingan ekonomi dengan pekerja migran Rohingya. Hal ini akan merugikan Indonesia jika terus menerima migran ilegal Rohingya di wilayahnya. Yang kita tahu, Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dengan jumlah penduduk produktif. Dana pemrosesan imigran Rohingya dialihkan melalui dana APBN. Seperti di negara Bangladesh, pemerintah disana bersama dengan UNHCR meminta bantuan kepada negara-negara mitranya untuk menggalangkan dana kemanusiaan Rohingya dengan proyeksi nilai mencapai USD 876 juta atau senilai Rp. 13,14 triliun. (Kamrul Hasan, 2023), hal ini juga dirasakan oleh Indonesia. jika terus menerus menerima imigran Rohingya yang akan membebankan anggaran APBN kepada pemerintah pusat. Akibat dari persaingan ekonomi yang muncul antara kelompok-kelompok ini, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan tingkat pengangguran terbuka di kalangan pekerja lokal di wilayah perbatasan. Tingkat pengangguran terbuka di Aceh hingga Agustus 2023 sebesar 6,03%, turun dari 6,17% pada Agustus 2022, tetapi di Lhokseumawe, tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,78%. (Khabar NakerTrans, 2023). Namun, angka pengangguran di Aceh turun pada tahun 2022-2023. Namun, ada 157 ribu orang yang saat ini menganggur di Aceh. Di Aceh, sebagian besar pengangguran adalah lulusan sekolah menengah atau sederajat. Sebaliknya, lapangan kerja formal sangat terbatas di wilayah perbatasan, yang membuat sulit untuk menerima pekerja baru dari masyarakat lokal. Tidak diragukan lagi, situasi ini memiliki potensi untuk menimbulkan kecemburuan sosial dan, jika tidak diatasi dengan baik, dapat menghasilkan konflik yang lebih besar.

Penerapan Teori Integrasi sosial AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency)

Penelitian menggunakan teori integrasi sosial menurut Talcott Parsons. Teori ini menjelaskan empat fungsi penting yang harus dipenuhi agar sebuah integrasi sosial dapat bertahan dan berintegrasi dengan baik. (Ritzer et al., 2018), sehingga keempat fungsi tersebut sangat relevan untuk merumuskan strategi integrasi sosial dan ekonomi imigran ilegal Rohingya di wilayah perbatasan Indonesia-Myanmar. Pertama, fungsi Adaptasi (A) itu

menunjuk pada kemampuan sebuah integrasi/sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui pencarian sumber daya dan optimasi tujuan kolektif.(Talcott Parsons, 1951), Sehingga strategi integrasi yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan akses dan peluang yang sama pada imigran Rohingya untuk dapat berpartisipasi dalam sektor pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas hidup dan kompetensi skill mereka. Sehingga di kemudian hari ada keterampilan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha mandiri atau terserap ke pasar kerja lokal. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Equal Rights Trust. & Institute of Human Rights and Peace Studies., 2014) membahas mengenai Malaysia, Bangladesh bisa hidup berdampingan dengan imigran ilegal Rohingya. Sehingga imigran ini bisa berkontribusi kepada PDB negara.

Kedua, fungsi Pencapaian Tujuan (G) hal ini berkaitan dengan perumusan dalam tujuan bersama dan penyusunan sebuah rencana kerja yang melibatkan aktor dalam integrasi. Aktor yang dimaksud konteks ini adalah masyarakat lokal, imigran Rohingya dan pemerintah setempat. (Podolny et al., 2005), oleh karena itu, ada sebuah strategi yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan cara membentuk sebuah forum koordinasi lintas dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menyusun sebuah program integrasi imigran Rohingya yang bersifat komprehensif atau menyeluruh. Sehingga dapat diimplementasikan bersama di wilayah perbatasan Indonesia-Myanmar tentunya harus berkolaborasi dengan pihak pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta.

Ketiga, fungsi Integrasi (I) fokus dalam fungsi ini ada pada penciptaan kohesi sosial atau kekuatan ikatan antar anggota masyarakat atau kelompok. Jika semakin kuat kohesi sosial, maka semakin kuat rasa kebersamaan dan saling percaya antar anggota masyarakat. dan harmoni hubungan yang mengacu pada keharmonisan dan keselarasan hubungan antar anggota masyarakat atau kelompok. Jika semakin harmonis hubungan antar kelompok, maka semakin mudah mereka dalam mengatasi adanya perbedaan dan konflik yang muncul antar kelompok di tengah masyarakat. (John Turner, 2001). Untuk itu, strategi yang dapat ditempuh dengan sosialisasi budaya bertema kebhinekaan serta melakukan dialog antar pemuka agama dan tokoh adat untuk membangun rasa saling pengertian dan toleransi lintas kelompok ini. Selain itu, diadakan program kerja bakti dan hari raya keagamaan juga dapat diselenggarakan secara bersamaan untuk memperkuat kohesi sosial yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Myanmar.

Keempat, fungsi Latensi (L) hal ini berkaitan dengan sosialisasi dan internalisasi nilai serta norma bersama yang mengikat semua anggota masyarakat. (Ritzer et al., 2018). Untuk merumuskan sebuah strategi yang dapat diambil adalah dengan adanya pelatihan instruktur nasionalisme multikultural yang perlu digelar secara rutin tiap bulan di wilayah perbatasan, dengan melibatkan seluruh peserta dari kalangan imigran Rohingya dan masyarakat lokal. Pembahasan sosial ini mencakup nilai-nilai kebangsaan, inklusivitas dan kesetaraan yang perlu ditekankan dalam kurikulum pelatihan dalam membangun sifat kesadaran yang kolektif lintas kelompok. Dengan menerapkan empat fungsi utama dalam teori integrasi sosial, diharapkan menghasilkan sebuah strategi yang dapat menciptakan sistem sosial di perbatasan yang adaptif, kolaboratif, kohesi dan inklusif bagi imigran Rohingya maupun masyarakat lokal. Dengan demikian potensi friksi dan konflik horizontal ini dapat diminimalisir demi terwujudnya kerukunan antar kelompok di tengah masyarakat tepatnya di wilayah perbatasan Indonesia-Myanmar.

Tantangan Dalam Penerapan Strategi Integrasi Sosial dan Ekonomi di Wilayah Perbatasan

Namun dalam penerapan integrasi sosial dan ekonomi di masyarakat lokal khususnya di wilayah perbatasan, tidak berjalan sesuai dengan konsep integrasi itu sendiri. Karena berbeda

ketika di lapangan, saat ini adanya perlawanan dan penolakan dari warga lokal dengan menerima imigran ilegal Rohingya, karena banyak dari masyarakat menanggung kerugian yang ditimbulkan atas kedatangan imigran ilegal Rohingya di perbatasan. Tentunya bukan tanpa sebab masyarakat melakukan hal itu. (AMANDA JUFRIAN, 2023). kedatangan imigran Rohingya yang sering membuat masalah di Indonesia seperti kabur dari lokasi penampungan maupun tak puas ketika diberi makanan, mencuri hasil panen warga, melarikan diri dari tempat penampungan, ingin mendirikan negara sendiri, tidak bisa diatur oleh negara, bahkan ada beberapa dari imigran yang terlihat bermesraan di tempat penampungan yang tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum Islam di Aceh yang terkenal kental dengan syariat agama Islam.

Tantangan dalam hukum dan regulasi, imigran ilegal Rohingya yang berada di Indonesia saat ini dalam situasi hukum yang kompleks, karena tidak memiliki dokumen yang resmi. Hal ini tentunya dapat menyulitkan mereka untuk mengakses ke layanan sosial dan ekonomi. (John Smith, 2019). pada penelitian sebelumnya (Dewi Yuwastina, 2021), keberadaan imigran Rohingya di negara Malaysia menjadi target sasaran dalam kasus perdagangan orang (Human Trafficking), perampokan, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini bisa terjadi karena Imigran Rohingya tidak memiliki dokumen resmi. Regulasi yang mengatur hal ini juga kurangnya kejelasan dalam proses administrasi sehingga menghambat dalam proses integrasi sosial dan ekonomi imigran ilegal Rohingya. Dilihat dari sisi sosial, tantangannya yaitu perbedaan bahasa yang menyebabkan sulit berkomunikasi, berbeda agama tidak semua imigran Rohingya itu beragama Islam melainkan ada juga yang beragama Kristen, Hindu, Buddha. Dan adanya perbedaan budaya masyarakat di wilayah perbatasan dengan imigran Rohingya, hal ini menjadi hambatan dalam proses integrasi sosial. (Christyanti, 2022). Adanya stigma buruk dan diskriminasi kepada imigran Rohingya yang dilakukan masyarakat setempat, tentunya mempengaruhi dalam proses integrasi sosial mereka. hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Equal Rights Trust. & Institute of Human Rights and Peace Studies., 2014)

Adanya tantangan dalam mendapatkan pendidikan formal menyulitkan mereka untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mencari kerja yang layak di wilayah perbatasan (Ahmad Rahman, 2019). Tantangan dalam penyerapan ketenagakerjaan, imigran ilegal Rohingya demi bertahan hidup sering kali bekerja di sektor informal dengan upah yang rendah dan mendapatkan pekerjaan yang buruk. (Delina L., 2018). Hal ini juga membuat persaingan ekonomi yang ketat dengan tenaga kerja lokal, sehingga sulit mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Yang terakhir tantangan dalam mengakses pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Karena pelayanan disana memadai sehingga menjadi kendala bagi imigran ilegal Rohingya. (Fifit Ayu Kartika Sari, 2016). Tingkat penyakit dan kondisi kesehatan yang buruk itu juga terjadi dengan beberapa imigran Rohingya, hal ini juga mempengaruhi proses integrasi sosial dan ekonomi mereka.

Rekomendasi Kebijakan Integrasi Imigran Rohingya

Berdasarkan analisis yang dari hasil teori integrasi sosial, ada beberapa strategi integrasi sosial dan ekonomi imigran ilegal Rohingya yang dapat dinilai efektif dan dapat diterapkan di wilayah perbatasan Indonesia-Myanmar. Strategi-strategi ini perlu diwujudkan yang dituangkan dalam sebuah kebijakan penanganan imigran ilegal Rohingya yang komprehensif atau menyeluruh sehingga dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut. Dilihat dari segi regulasi, pemerintah harus mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus untuk mengatur penanganan imigran ilegal termasuk Rohingya yang saat ini berada di wilayah perbatasan Indonesia. (Rusli S, 2021). Perpres tersebut bisa dijadikan payung hukum bagi berbagai program khusus dalam integrasi sosial dan ekonomi. Sehingga memerlukan pendanaan dari APBN maupun APBD untuk wilayah perbatasan Indonesia-Myanmar. Selain itu,

perlu dilakukannya revisi UU keimigrasian juga penting untuk memberikan jalur bagi imigran ilegal Rohingya, mendapatkan izin untuk tinggal sementara selama menunggu proses relokasi atau pemulangan ke negara asalnya. (UNHCR, 2015)

Beberapa program rekomendasi yang didukung oleh penelitian sebelumnya (Azis S, 2018), untuk menciptakan strategi integrasi sosial dan ekonomi yang dapat diterapkan di wilayah perbatasan Indonesia-Myanmar yaitu: Adanya pelatihan dalam mediator konflik dan instruktur multikulturalisme dari tokoh agama dan masyarakat; Adanya penyediaan anggaran dalam layanan pendidikan dan kesehatan khusus bagi imigran ilegal yang berada di wilayah perbatasan; Pemberian bantuan modal dan memberikan pelatihan perihal kewirausahaan bagi imigran Rohingya; Adanya program yang padat karya infrastruktur daerah yang melibatkan tenaga imigran Rohingya; Memberikan peningkatan anggaran dalam pelatihan vokasi dan kompetensi bagi pekerja lokal. Jika dari segi kelembagaan, perlu dibentuk forum koordinasi lintas kelompok di sektor dan Pemerintah Daerah yang secara khusus menangani isu imigran ilegal khususnya Rohingya yang berada di wilayah perbatasan. (R. Manurung et al, 2021), Forum ini dapat dijadikan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sekaligus dapat memantau dan mengevaluasi tingkat efektivitas implementasi sebuah program di lapangan. Adanya partisipasi organisasi masyarakat sipil dan filantropis juga penting untuk memastikan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi imigran Rohingya dapat tersalurkan dan berjalan lancar secara transparan dan akuntabilitas. Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan pemerintah dapat segera menindaklanjuti dalam upaya menangani imigran ilegal Rohingya dan isu terkait lainnya di wilayah perbatasan secara lebih terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Adanya komitmen politik yang kuat ini dibutuhkan agar kebijakan integrasi sosial dan ekonomi yang menyeluruh sehingga dapat mewujudkan dan menciptakan kerukunan antar kelompok dan kondisi stabilitas di kawasan perbatasan Indonesia-Myanmar.

KESIMPULAN

Strategi integrasi sosial imigran ilegal Rohingya di wilayah perbatasan Indonesia dan Myanmar sangat penting untuk memastikan mereka dapat hidup di wilayah perbatasan dengan baik dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Namun, seiring berlanjutnya perang saudara di Myanmar, arus migran terus meningkat. Integrasi sosial dan ekonomi imigran ilegal Rohingya merupakan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Imigran ilegal Rohingya berjuang untuk mengakses pendidikan, pekerjaan dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Integrasi imigran ilegal Rohingya di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Myanmar tidak hanya merupakan inisiatif kemanusiaan, tetapi juga merupakan peluang untuk menumbuhkan kohesi sosial dan pembangunan ekonomi. Dengan mendorong inklusi sosial, kedua negara dapat membangun masyarakat yang menghargai keberagaman dan mengedepankan persatuan dan solidaritas. Integrasi ekonomi memungkinkan Indonesia dan Myanmar memanfaatkan potensi migrasi Rohingya dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan di wilayah masing-masing. Kedua negara harus bekerja sama untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan Rohingya dan menjamin kesejahteraan penduduk lokal.

Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah utama yang menyebabkan migrasi Rohingya, yaitu konflik. Disamping itu seiringan kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan dalam memberikan pendidikan, pelatihan kerja, dan pelayanan kesehatan bagi imigran ilegal Rohingya. Pemerintah Indonesia harus membangun program integrasi yang mencakup pembelajaran bahasa Indonesia, pelatihan kerja, dan pelatihan profesional. Dan juga mengajak masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam

mendukung integrasi sosial imigran Rohingya ilegal dengan mengadakan kegiatan budaya, sosial, dan ekonomi yang melibatkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rahman. (2019). Economic Integration of Rohingya Refugees in the Border Areas of Indonesia and Myanmar. International Organization for Migration.
- Alchatib, S. R. (2021). The Political and Economic Impacts of Rohingya Refugee Crisis: Challenges and Opportunities of Humanitarian Intervention in Post-Conflict Space. *Insignia Journal of International Relations Edisi Khusus*, 88–101.
- Amanda Jufrian. (2023, December 8). Akar Masalah Pengungsi Rohingya Membludak di Aceh Bikin Warga Resah. *CNN Indonesia*, 1–2. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231207151842-106-1034216/akar-masalah-pengungsi-rohingya-membludak-di-aceh-bikin-warga-resah/2>.
- Andrew McConnell. (2024, January 19). Siaran Pers UNHCR: Jumlah keadaan darurat kemanusiaan pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi dalam satu dekade. United Nations High Commissioner for Refugees. <https://www.unhcr.org/news/press-releases/unhcr-number-humanitarian-emergencies-in-2023-highest-in-decade>
- Azis S. (2018). Local Resource-Based Development Planning in Border Regions. *Journal of Regional and City Planning*, 29(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.5614/jpwk.2018.29.3.4>
- Christyanti, B. L. (2022). Hak Suaka versus Kedaulatan: Studi Kasus Pencari Suaka Etnis Rohingya. *Jurnal HAM*, 13(2), 333. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.333-346>
- Delina L. (2018). Rohingya Refugees and the Host Community in Indonesia: Social Mapping in North Aceh. *Journal of Identity and Migration Studies*, 12(1). https://www.emigration.ro/JIMS/Vol12_No1_2018/JIMS_Vol12_No1_2018.pdf#page=49
- Dewi Yuwastina. (2021). The Root Cause Of Trafficking In Persons For The Protection Strategy In The Rohingya Crisis. *Indonesian Journal of International Law*, 18(2), 253–292. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.2.811>
- Equal Rights Trust., & Institute of Human Rights and Peace Studies. (2014). Equal only in name : the human rights of stateless Rohinya in Malaysia. Equal Rights Trust.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. (2024, January 10). Integrasi Sosial, etnisitas, dan kemiskinan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. <https://fisip.ui.ac.id/integrasi-sosial-etnisitas-dan-kemiskinan/>
- Farhanditya. (2023, February 16). Perkembangan Terbaru Mengenai Pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia. UNCHR INDONESIA. <https://www.unhcr.org/id/16531-perkembangan-terbaru-mengenai-pengungsi-rohingya-di-aceh-indonesia.html>
- Fifit Ayu Kartika Sari. (2016). Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingnya di Indonesia [Skripsi]. Universitas Brawijaya .
- Heckmann F, & Bosswick D. (2006). Integration of migrants: Contribution of local and regional authorities. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_
- Ikuteyijo U. D. (2021). Induced Xenophobia against Refugees and Asylum Seekers in South Africa. *Journal of Developing Societies*, 37(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0169796X211009399>
- IOM. (2018). Impacts of the Influx of Rohingya Refugees on Host Communities in Cox's Bazar District, Bangladesh".
- J. Moleong Lexy. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.

- John Smith. (2019). Integrating Illegal Rohingya Immigrants in Aceh: Challenges and Strategies. Aceh Publishing.
- John Turner. (2001). The Formation of Social Capital. Social Capital: Theory and Research. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781410602268-8>
- Kamanto Sunarto. (1993). Pengantar Sosiologi . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kamrul Hasan. (2023, March 7). UNHCR, partners seek \$876m for Rohingya refugees facing “chilling fog of uncertainty” and for Bangladeshi hosts. UNHCR . <https://www.unhcr.org/news/unhcr-partners-seek-876m-rohingya-refugees-facing-chilling-fog-uncertainty-and-bangladeshi>
- Khabar NakerTrans. (2023, November 8). BPS: Angka Pengangguran di Aceh Turun. Disnakermobduk ACEH. <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/ppid/bps-angka-pengangguran-di-aceh-turun#:~:text=BANDA%20ACEH%20%2D%20Fungsional%20Statistisi%20Badan,kabupaten%20atau%20kota%20di%20Aceh%2C%22>
- Nanda Fahriza Batubara. (2023). Penolakan Aceh dan Dampak Ekonomi di Balik Tragedi Rohingya . Tirto.Id. <https://tirto.id/penolakan-aceh-dan-dampak-ekonomi-di-balik-tragedi-rohingya-gSHk>
- Podolny, M. Joel, Rakesh Khurana, & Marya L. Hill-Popper. (2005). Revisiting the Meaning of Leadership. Research in Organizational Behavior, 26, 1–36. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0191-3085\(04\)26001-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0191-3085(04)26001-4).
- R. Manurung et al. (2021). Transborder Cooperation Model through Socio-Cultural Approach. Indonesia Social Work Journal , 2(2). <https://doi.org/https://journal.iswlec.or.id/index.php/iswj/article/view/90>
- Ritzer, George, & Jeffrey Stepnisky. (2018). Sociological Theory (. 10th ed). SAGE Publications. .
- Rusli S. (2021). Towards a Comprehensive Refugee Law and Policy in Indonesia: Lessons from Australia and Turkey. Indonesian Law Journal, 1. <https://doi.org/10.33331/ilj.v1i1.15>
- Siddiqui M.A, & Akhter C. (2020). International Migration and Conflict in Developing Countries: A Case Study of Indonesian–Rohingya Conflict in Rakhine State. Journal of Liberty and International Affairs, 5(3), 64–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.47305/JLIA2035064s>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan ke 19). ALFABETA, CV.
- Talcott Parsons. (1951). The Social System. Routledge.
- UNHCR. (2015, June 24). Guidelines on International Protection No. 11 . Prima Facie Recognition of Refugee Status. <https://www.refworld.org/docid/555c335a4.html>